

**STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)
TERHADAP SUBSIDI PERIKANAN YANG MEMPENGARUHI
*FISHERMAN SOVEREIGNTY***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

**Fadhel Athhar Rahmatullah
07041381924208**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)
TERHADAP SUBSIDI PERIKANAN YANG MEMPENGARUHI
FISHERMAN SOVEREIGNTY”**

**Skripsi
Oleh :
Fadhel Athhar Rahmatullah
07041381924208**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 10 Januari 2024**

Pembimbing :

1. Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M
NIP. 196504271989031003

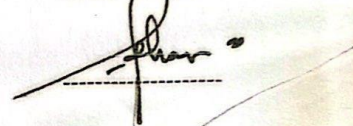
2. Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP. 19931008202012102

Penguji :

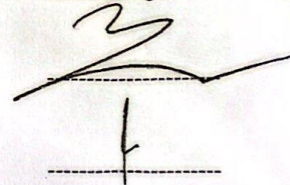
1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si
NIP. 198708192019031006

2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP. 198805252023211033.

Tanda Tangan



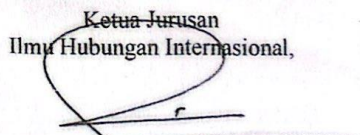
Tanda Tangan



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfritri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)
TERHADAP SUBSIDI PERIKANAN YANG MEMPENGARUHI
FISHERMAN SOVEREIGNTY**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam

Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

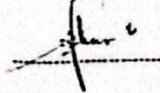
Fadhel Athhar Rahmatullah

07041381924208

Pembimbing I
Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M
196504271989031003

Tanda Tangan

Tanggal



Pembimbing II
Abdul Halim, S.IP., MA
199310082020121020



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Fadhel Athhar Rahmatullah

NIM 07041381924208

Jurusan Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Terhadap Subsidi Perikanan yang Mempengaruhi *Fisherman Sovereignty*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Fadhel Athhar Rahmatullah

NIM. 07041381924208

ABSTRAK

Perikanan memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi suatu negara, khususnya bagi nelayan sebagai pemangku kepentingan utama di sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait subsidi perikanan dan dampaknya terhadap kedaulatan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi literatur, dan analisis kebijakan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, untuk memahami secara mendalam strategi yang telah diimplementasikan oleh KKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi perikanan yang diterapkan oleh KKP memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosio-ekonomi nelayan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan, beberapa kebijakan subsidi cenderung mempengaruhi kedaulatan nelayan, baik dari segi keputusan produksi maupun ketergantungan pada bantuan pemerintah. Analisis strategi KKP dalam penelitian ini mencakup evaluasi kebijakan subsidi yang ada, identifikasi potensi perbaikan, dan rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan sambil mempertahankan *sovereignitas* nelayan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Kata kunci: Kementerian Kelautan dan Perikanan, subsidi perikanan, *Fisherman Sovereignty*

ABSTRACT

Fisheries have an important role in supporting a country's food and economic security, especially for fishermen as the main stakeholders in this sector. This research aims to analyze the strategies implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) regarding fisheries subsidies and their impact on fishermen's welfare. This research uses qualitative literature study methods, policy analysis. Data analysis was carried out using a qualitative approach to understand in depth the strategies that have been implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The research results show that fisheries subsidies implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries have a significant impact on the socio-economic conditions of fishermen. Even though they aim to increase production and welfare of fishermen, several subsidy policies tend to affect fishermen's welfare, both in terms of production decisions and dependence on government assistance. The analysis of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries strategies in this research includes evaluation of existing subsidy policies, identification of potential improvements, and recommendations for increasing the desirability of the fisheries sector while maintaining fishermen's sovereignty. It is hoped that the implications of this research can provide guidance for developing more effective and sustainable policies in the future.

Keywords : *Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Fisheries Subsidies, Fisherman Sovereignty*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa peradaban dunia ini menjadi era teknologi maju dan canggih sepertisaat ini. Skripsi ini saya buat sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Saya tentunya sangat sadar bahwa penelitian ini berhasil diselesaikan atas banyaknya bantuan, bimbingan, dukungan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak darisaya memulai perkuliahan sampai akhirnya saya menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat baik nikmat sempat maupun nikmat sehat serta nikmat untuk saya berpikir sehingga saya dapat menjalani Pendidikan kuliah dari awal hingga proses akhir saat ini dengan baik dan lancar.
2. Keluarga , Ayah (Purnamasnyah), dan Ibu (Erni Sasmiati), dan juga Saudara Kandung saya yang selalu memberikan doa dan dukungan selama saya mengemban pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan saya di Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M dan Bapak Abdul Halim S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
8. Teman-teman band saya yang menjadi tempat hiburan bagi saya dikala susah, Keluarga Sanggar Seni Fisip yang sudah menjadi rumah kedua bagi saya dan telah menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak lupa rekan-rekan HI A Palembang yang telah menemani saya selama melaksanakan perkuliahan disini.

Saya sangat menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penelitian serta penulisan dalam skripsi ini. Maka dari itu, saya mengucapkan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan dari penelitian yang saya buat. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan pihak lainnya.

Palembang, 07 Desember 2023

Fadhel Athhar Rahmatullah
NIM. 07041381924 208

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.3 Alur Pemikiran	15
2.4 Argumen Utama	16

BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1. Desain Penelitian	17
3.2. Definisi Konsep.....	18
3.3. Fokus Penelitian	18
3.4. Unit Analisis.....	20
3.5. Jenis dan Sumber Data	20
3.5.1 Jenis Data.....	20
3.5.2 Sumber Data	20
3.6. Teknik Pengumpulan data.....	22
3.7. Teknik Keabsahan Data	22
3.8. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM	26
4.1. Kondisi Nelayan	26
4.1.1 Kondisi Nelayan Global	26
4.1.2 Kondisi Nelayan Indonesia.....	28
4.2. Kedaulatan Nelayan	30
4.3 Subsidi Perikanan.....	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
5.1. <i>Define The Problem</i>	39
5.2 <i>Identify the Decision Criteria</i>	41
5.3 <i>Assign Weights to the Criteria</i>	43
5.4 <i>Create a list of options and order them</i>	46

5.5	<i>Choose the best option and finalize the decision</i>	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		51
6.1	Kesimpulan	51
6.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN.....		57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.3 Fokus Penelitian	16
Tabel 4.1.2 Kondisi Nelayan.....	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Alur Berfikir.....	14
--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

KKP	: Kementrian Kelautan dan Perikanan
KTM	: Konferensi Tingkat Menteri
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
ITO	: <i>International Trade Organization</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
SCM	: <i>Subsidies and Countervailing Measures</i>
CTE	: <i>Committee on Trade and Environment</i>
SDG	: <i>Sustainable Development Goals</i>
GT	: <i>Gross Tonnage</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“subsidi” merupakan suatu istilah pertama kali dicetuskan dalam *Havana Charter* yang dikukuhkan untuk mendirikan *International Trade Organization* (ITO), kemudian istilah ini diadopsi dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Kemudian telah disepakati bahwa pengertian subsidi dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM Agreement) sebagai suatu pengertian hukum yang disepakati secara internasional. Menurut Pasal 1 SCM Agreement subsidi terjadi karena ada kontribusi finansial dari pemerintah maupun lembaga publik lain (Sitanggang, 2019).

FAO mengartikan subsidi perikanan sebagai “*Government actions or inactions outside of normal practices that modify by increasing or decreasing the potential profits by the fisheries industry in the short, medium, or long-term*”. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kegiatan subsidi perikanan terlaksana saat pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu di luar praktik pada umumnya demi mendapatkan keuntungan dari industri perikanan. Variabilitas kategori subsidi di sektor perikanan mendorong setiap negara anggota untuk memasukkan pembahasan subsidi perikanan ke dalam sidang WTO. Pada tahun 1996 persoalan subsidi perikanan mulai dibahas di dalam forum WTO meskipun terdapat nada skeptis tentang relasi antara lingkungan serta perdagangan terkhusus terhadap persoalan tentang subsidi perikanan, overfishing dan manajemen perikanan yang sifatnya berkelanjutan (Hilton T. putra, 2016).

Apa yang dimaksud dengan kedaulatan (*sovereignty*) sendiri merupakan sebuah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat mengendalikannya,

yang dapat mengatur warga negara dan juga mengatur apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan yang membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya (Nrangwesti, 2022).

Setiap nelayan baik individu maupun berkelompok sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan kedaulatannya. Karena, nelayan berkontribusi terhadap pangan nasional yang dimana hasil laut mulai dari garam hingga perikanan sangat tinggi dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia (Serikat Petani Indonesia, 2012). Selain itu juga, Pemerintah Indonesia mewajibkan keterlibatan nelayan di seluruh Nusantara sebagai ujung tombak penjaga keamanan dan kedaulatan perairan laut Indonesia. Agar peran para nelayan bisa dilaksanakan, Negara harus bisa memberikan perlindungan kepada mereka terhadap ruang tangkap di laut (Ambari, 2020).

Korelasi antara subsidi perikanan dengan *overcapacity* bisa diperhatikan saat pemerintah sedang melakukan usaha dalam menghasilkan produk perikanan yang menjadi tujuan dalam manajemen perikanan, namun yang terjadi adalah kemampuan dalam menghasilkan produk yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengelola sumber daya perikanan secara optimal. Selama perikanan sedang mengalami atau disaat harga-harga perikanan sedang membaik, infrastruktur akan dikembangkan sedemikian rupa supaya keuntungan kedepannya akan lebih banyak. Akan tetapi, apabila perikanan cenderung menurun, pemerintah akan menyediakan bantuan dalam pencegahan akan adanya pengangguran ataupun runtuhnya infrastruktur dan investasi (Sitanggang, 2019).

Sejak WTO didirikan pada tahun 1995, perubahan yang signifikan dalam konteks politik dari masalah tersebut telah terjadi. Dorongan kesertaan subsidi perikanan dalam agenda perdagangan internasional secara substansial, keutamaannya dikarenakan telah diperlakukan tidak hanya sebagai masalah pemerataan dan efisiensi dalam perdagangan internasional tetapi sebagai masalah pengurangan dalam perlindungan sumber daya alam. Pembentukan WTO *Committee on Trade and Environment* (CTE) mencerminkan suatu usaha WTO agar lebih peduli terhadap implikasi lingkungan perdagangan serta implikasi perdagangan dari langkah-langkah kebijakan lingkungan telah memungkinkan diskusi potensi keuntungan lingkungan dari penghapusan atau pengurangan subsidi. (UNEP, 2001)

Diskusi di dalam CTE terhadap subsidi perikanan pada tahun 1997-1998 berfokus pada perbedaan pandangan politik terhadap bukti yang mendukung bahwasanya subsidi perikanan memiliki dampak negatif pada stok ikan dan apakah subsidi tersebut harus dipilih untuk perlakuan khusus. Beberapa anggota di dalam perdebatan menganggap remeh pentingnya subsidi yang menjadi penyebab terjadinya *Overfishing*.

Dorongan lanjutan untuk dimasukkannya topik subsidi perikanan di putaran negosiasi perdagangan multilateral mendatang yang telah berkembang pada tahun 1999 dari timbulnya koalisi internasional yang lebih luas dalam mendukung kesepakatan WTO tentang penghapusan subsidi di sektor perikanan yang berdasar kepada masalah *Overcapacity* dari armada perikanan (UNEP, 2001).

Pada dasarnya subsidi telah diatur dalam GATT 1947 dan umumnya dipandang sebagai hal yang berdampak baik, sebagai mekanisme di mana kebijakan pemerintah terkait bantuan pemerintah dapat di aplikasikan. Namun untuk saat ini pandangan setiap negara tentang subsidi telah berubah seiring adanya pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan kemampuan pengendaliannya. Selain itu adanya keraguan terhadap peran pemerintah

terhadap masyarakat dan ekonomi, serta mengenai keadaan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, maka subsidi dalam berbagai bidang ekonomi umumnya dianggap hal-hal buruk, terlebih lagi dalam sektor perikanan (Ismail, 2021).

Pada tahun 2001 isu subsidi perikanan telah menjadi negosiasi formal di dalam agenda WTO, namun sampai juni 2022, pada saat konferensi tingkat menteri WTO ke-12, masih belum ada kesepakatan terhadap perjanjian subsidi perikanan. Terlepas dari konsensus di komunitas internasional, sebagaimana dicerminkan dalam target Keanekaragaman Hayati Aichi dan *Sustainable Development Goals* (SDG) 14,6 yang mengarahkan diskusi terkait menghapus subsidi perikanan yang berdampak buruk yang harusnya rampung pada tahun 2020. Tekanan untuk menghapus subsidi yang berbahaya juga tercerminkan pada Konferensi Tinjauan tahun 2016 yang kemudian dilanjutkan pada Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 yang membahas tentang *Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, dan juga telah ada tekanan menerus dari kelompok masyarakat sipil yang antara lain untuk mengatasi subsidi perikanan yang berbahaya (Lenan & Stephanie, 2023).

Indonesia yang merupakan salah satu anggota WTO memiliki kesempatan dalam berpartisipasi aktif terhadap negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan, sehingga Indonesia dapat memastikan hasil dari pembentukan aturan subsidi perikanan WTO tidak memperlambat pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan subsidi perikanan yang diperlukan kepada setiap pelaku sektor perikanan Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia mengajukan sebuah proposal yang berjudul "*Proposed Disciplines on Prohibitions and Special and Differential Treatment For Fisheries Subsidie*" dengan nomor referensi TN/RL/GEN/189. Proposal ini berisikan tuntutan dari Indonesia yang ingin mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan

negara berkembang dengan sektor perikanan yang didominasi oleh para nelayan tradisional sampai menengah sehingga diperlukannya praktik pemberian subsidi perikanan dan tidak berpotensi mengalami *Overfishing* (Ismail, 2021).

Indonesia melalui tiga aturannya mencoba melegitimasi tindakan subsidi dan bantuan pemerintah dalam bidang perikanan. Pertama, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mana tersebar dalam beberapa Pasal. Pada Pasal 17 menegaskan bahwa pemerintah harus memfasilitasi para pelaku usaha untuk mewujudkan industri perikanan di Indonesia, Kedua, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 25 B kewajiban pemerintah terkait bantuan fasilitas untuk pemasaran. Ketiga, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam salah satu tujuan dalam aturan ini yaitu terkait dengan menyediakan prasana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Secara gamblang pengaturan subsidi hanya disebutkan pada Pasal 24, bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi berupa BBM, air bersih dan es, benih, bibit, pakan, dan obat ikan yang ditujukan kepada nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam yang nantinya pelaksanaannya akan didasarkan pada peraturan presiden yang hingga saat ini sedang dibahas (Ismail, 2021).

Sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap WTO, Indonesia melakukan Notifikasi terhadap subsidi yang diterapkan seperti *National fish logistic system, the empowerment of community salt companies program, the development of community salt companies program, the fishing ship vessel construction program, the rural bussines development program, dan fisher insurance*. Semua program subsidi ini tidak membahayakan perdagangan internasional karena diterapkan hanya untuk menunjang kesejahteraan nelayan skala kecil.

Notifikasi yang dijabarkan Indonesia cukup jelas serta kemungkinan dampak dari penerapan subsidi tersebut (Ismail, 2021).

Subsidi perikanan dianggap sebagai langkah yang tepat bagi para nelayan di Indonesia agar dapat mengeksploitasi kekayaan laut yang ada di perairan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional para nelayan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Permasalahan sering terjadi karena subsidi perikanan yang dianggap kurang tepat sasaran oleh beberapa nelayan karena para perusahaan perikanan berskala besar masih mendapatkan subsidi terutama subsidi di sektor energi seperti BBM. Sehingga, hal inilah menjadi penyebab terjadinya *overfishing*. *Overfishing* dapat dikatakan sebagai efek domino yang pada akhirnya akan menghancurkan perekonomian negara dan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang (Ismail, 2021).

Penerapan subsidi perikanan di Indonesia merupakan bentuk untuk menunjang produksi dalam negeri supaya dapat mensejahterakan taraf hidup nelayan berskala kecil. Merujuk pada Dokumen Notifikasi Subsidi Indonesia ke WTO, telah dijelaskan bahwa penerima manfaat dari subsidi perikanan tersebut hanya bersektor pada nelayan skala kecil dan entitas bisnis berskala kecil (UMKM). Bentuk kepatuhan Indonesia terhadap pengaturan subsidi perikanan WTO juga ditunjukkan dengan adanya penyesuaian aturan-aturan hukum terkait subsidi dan bantuan dibidang perikanan seperti mengharuskan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan (Ismail, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah tentang bagaimana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Terhadap Subsidi Perikanan Yang Mempengaruhi *Fisherman Sovereignty*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan strategi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperjuangkan *Fisherman Sovereignty* yang terdampak akibat aturan subsidi perikanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi untuk melihat contoh seperti apa suatu strategi, dan usaha seperti apa dalam menyelesaikan permasalahan internasional, khususnya tentang Strategi Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Terhadap Subsidi Perikanan Yang Mempengaruhi Fisherman Sovereignty.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada KKP sebagai studi awal untuk melakukan pemilihan strategi yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam memperjuangkan kedaulatan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim. (2020). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap World Trade Organization dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan. *Padjajaran Journal of International Relations*, 18-33.
- AL hikam, H. A. (2023, February 2). *KKP Jamin Nelayan Dapat BBM Subsidi, Begini Caranya*. Retrieved from Finance Detik Web Site: <https://finance.detik.com/energi/d-6548021/kkp-jamin-nelayan-dapat-bbm-subsidi-begini-caranya>
- Ambari, M. (2020, January 17). *Pentingnya Peran Nelayan Menjaga Kedaulatan di Perbatasan*. Retrieved from MONGABAY: <https://www.mongabay.co.id/2020/01/17/pentingnya-peran-nelayan-menjaga-kedaulatan-di-perbatasan/>
- Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai paradigma. *Indonesian Journal of International Studies*, 107-122.
- DJPT. (2022, September 22). *KKP Perjuangkan BBM untuk Nelayan*. Retrieved from KKP.go.id: <https://kkp.go.id/djpt/artikel/44362-kkp-perjuangkan-bbm-untuk-nelayan>
- Ganti, A. (2023, May 27). *Rational Choice Theory: What It Is in Economics, With Examples*. Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/r/rational-choice-theory.asp>
- Grahadyarini, L. (2023, February 2). *Alokasi BBM Bersubsidi untuk Nelayan Ditambah*. Retrieved from kompas web site: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/02/alokasi-bbm-bersubsidi-nelayan-ditambah>
- Hartono, B. (n.d.). ANALISA TEORI PILIHAN RASIONAL MENGENAI SIKAP ABSTAIN INDONESIA DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRADE TREATY/ATT) TAHUN 2013. 1-26.
- Hilton T. putra, E. A. (2016). Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 395-408.
- HUMAS. (2018, July 22). *Uji Kredibilitas Penelitian Kualitatif*. Retrieved from penalaran-unm.org: [https://penalaran-unm.org/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/#:~:text=Menurut%20Lapau%20\(2012\)%20uji%20kredibilitas,kasus%20negatif%2C%20serta%20member%20check.](https://penalaran-unm.org/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/#:~:text=Menurut%20Lapau%20(2012)%20uji%20kredibilitas,kasus%20negatif%2C%20serta%20member%20check.)
- IFGJ . (2021, June 8). *Subsidi Perikanan Indonesia*. Retrieved from IFGJ web site: <https://igj.or.id/subsidi-perikanan-indonesia/>
- IFGJ. (2021, June 7). *DAMPAK BURUK BAGI NELAYAN BERSKALA KECIL*. Retrieved from IFGJ web site: <https://igj.or.id/dampak-hebat-bagi-nelayan-berskala-kecil/>

- Indeed. (2022, December 5). *Campaign planning: definition and steps to create one*. Retrieved from UK Indeed : <https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/campaign-planning>
- Ismail, W. S. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN INDONESIA BERDASARKAN PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN WTO. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 329-346.
- Kemlu RI. (2020, September 10). *Indonesia Kedepankan Kepentingan Nelayan Kecil dalam Perundingan Subsidi Perikanan di WTO*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Web Site: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1672/berita/indonesia-kedepankan-kepentingan-nelayan-kecil-dalam-perundingan-subsidi-perikanan-di-wto>
- Kompas. (2021, October 6). *Deskripsi Pekerjaan sebagai Nelayan*. Retrieved from Kompas web site: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/06/130000469/deskripsi-pekerjaan-sebagai-nelayan>
- Kusumastuti, A., & Khioron Mustamil, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lenan, M., & Stephanie, S. (2023). Agreement on Fisheries Subsidies. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 161-177.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, California: SAGE Publications.
- Maulana, I. (2023, August 21). *WTO, "Overfishing", dan Pendisiplinan Subsidi Perikanan*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/20/wto-overfishing-dan-pendisiplinan-subsidi-perikanan>
- Mawddah, R. Y. (2023). ATURAN SUBSIDI DALAM AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES TERHADAP PERIKANAN DI INDONESIA. 34-46.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* , 145-151.
- Nair, D. (2022, August 15). *Subsidi Perikanan: Lebih Berbahaya daripada Bermanfaat?* Retrieved from Faunalytics web site: <https://faunalytics.org/fishing-subsidies-more-harmful-than-helpful-indonesian/>
- Nrangwesti, A. (2022). KONSEP KEDAULATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum*, 11-24.
- Oktaviardy, F. (2023). PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA.
- Priyambodo, U. (2022, December 3). *300 Nelayan Global Tewas per Hari, Bagaimana Nasib Nelayan Indonesia?* Retrieved from National Geographic Indonesia:

<https://nationalgeographic.grid.id/read/133596429/300-nelayan-global-tewas-perhari-bagaimana-nasib-nelayan-indonesia?page=all>

- Putra, H. T. (2014). a dan Aqimuddin, Pengaturan Subsidi Perikanan dalam WTO dan Dampaknya bagi Indonesia . *Mimbar Hukum*, 395-408.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.
- Ritchie, H., & Roser, M. (2021, October). *Fish and Overfishing*. Retrieved from Our World In Data web site: <https://ourworldindata.org/fish-and-overfishing#employment-and-livelihoods-in-fishing>
- Rizki Kamalina, A. (2022, Juny 19). *KKP Terus Perjuangkan Subsidi Nelayan di WTO*. Retrieved from Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220619/9/1545353/kkp-terus-perjuangkan-subsidi-nelayan-di-wto>
- Rizki Kamalina, A. (2022, June 21). *KKP: Perjanjian Subsidi Perikanan WTO Berpotensi Tingkatkan Produksi dan Ekspor*. Retrieved from Bisnis Web Site: KKP: Perjanjian Subsidi Perikanan WTO Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "KKP: Perjanjian Subsidi Perikanan WTO Berpotensi Tingkatkan Produksi dan Ekspor
- Rizki Kamalina, A. (2022, Juny 21). *Soal Perjanjian Subsidi Perikanan di WTO, KKP: Nelayan Kecil Aman*. Retrieved from Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220621/12/1546278/soal-perjanjian-subsidi-perikanan-di-wto-kkp-nelayan-kecil-aman>
- Rusmana. (n.d.). PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN DALAM KETENTUAN GATT-WTO DIKAITKAN PRAKTIK SUBSIDI PERIKANAN DI INDONESIA . 1-124.
- Saeri, M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional*, 1-19.
- Schrank, E. W. (n.d.). *Introducing Fisheries Subsidies*. Retrieved from FAO web site: <https://www.fao.org/3/Y4647E/y4647e00.htm#Contents>
- Serikat Petani Indonesia. (2012, December 14). *Nelayan dan Petani, Penjaga Kedaulatan Pangan Nasional*. Retrieved from SPI web site: <https://spi.or.id/nelayan-dan-petani-penjaga-kedaulatan-pangan-nasional/>
- Setiawan, D. (2020, September 28). *Subsidi Sektor Perikanan*. Retrieved from KNTI web site: <https://knti.or.id/subsidi-sektor-perikanan/>
- Sitanggang, D. F. (2019). Disiplin Subsidi Perikanan Dalam Sistem Perdagangan Global dan Implikasinya Bagi Perikanan Indonesia. 1-36.
- The Conversation. (2022, July 7). *Surat terbuka 287 ilmuwan untuk WTO: larang subsidi perikanan yang merusak* . Retrieved from The Conversation Web Site: <https://theconversation.com/surat-terbuka-287-ilmuwan-untuk-wto-larang-subsidi-perikanan-yang-merusak-186402>

- UMSU. (2013, April 13). *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*. Retrieved from UPT Jurnal Ilmiah UMSU:
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Seperti%20yang%20telah%20disinggung%20sebelumnya,me ndapatkan%20hasil%20dari%20penelitian%20tersebut.>
- UNEP. (2001). Fisheries Subsidies and Overfishing: Toward a Structured Discussion. *Fisheries Workshop*, 1-39.
- Van Hooft, P. (2019, June 03). *Grand Strategy*. Retrieved from Oxford Bibliographies:
<https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0218.xml>
- WALHI. (2022, April 6). *Jumlah Nelayan di Indonesia Terus Menurun Akibat Krisis Iklim dan Industri Ekstraktif*. Retrieved from Walhi:
<https://www.walhi.or.id/jumlah-nelayan-di-indonesia-terus-menurun-akibat-krisis-iklim-dan-industri-ekstraktif>
- WTO. (2023, August 23). *Agreement on Fisheries Subsidies*. Retrieved from wto.org:
https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm
- Yarger, H. R. (2006). *STRATEGIC THEORY FOR THE 21st CENTURY: THE LITTLE BOOK ON BIG STRATEGY*. United States Government.
- Yusuf, N. M. (2023). *Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil*. Tasikmalaya: Lannggam Pustaka.